

**STRATEGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM PENDIDIKAN POLITIK
BAGI ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DI KABUPATEN ACEH TIMUR PROVINSI ACEH**

MUAMMAR KHADAVI

NPP. 30.0023

*Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: muammarkhadavi49@gmail.com
Pembimbing Skripsi: Dr. Dra. Meltarini, M.Si.*

ABSTRACT

Problem Statement /Background (GAP): The author focuses on the strategic problems of the National and Political Unity Agency in providing political education for community organizations in East Aceh District, Aceh Province. **Purpose:** The purpose of this study is to determine the strategy of the National and Political Unity Agency in providing political education to Community Organizations in East Aceh Regency and to find out the strength, weaknesses, opportunities and threats faced by Bakesbangpol in political education for Community Organizations in East Aceh District and also efforts to overcome problems that occur. **Method:** The research method used is a qualitative method, which answers a problem in depth in the context of the time and situation concerned, in accordance with objective conditions in the field and the type of research used is qualitative descriptive, which describes objects in the present qualitatively the data obtained from the research. The data sources used are primary data sources and secondary data sources with 4 informants. Data collection techniques use observation, interview and documentation methods. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation and conclusions. **Result:** Researchers found facts in the form of lack of budget from local governments to carry out political education tasks and functions for community organizations in East Aceh District, Aceh Province. In addition, researchers also found facts in the form of lack of employees owned by Kesbangpol in the implementation of the tupoksi and lack of competence or ability possessed by employees of the National and Political Unity Agency in carrying out the duties and functions of political education for Community Organizations. **Conclusion:** The researchers of this study concluded that the strategy that can be carried out by the National and Political Unity Agency is to utilize the nearest Community Organization and provide competency training for existing employees. From these conclusions, the author suggests that the National and Political Unity Agency can utilize existing social media in providing political education for Community Organizations and conducting socialization so that Community Organizations can immediately register with Kesbangpol East Aceh Regency. Community.

Keywords: Strategy, Political Education, Community Organization.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang(GAP): Penulis berfokus pada permasalahan strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memberikan pendidikan politik bagi organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memberikan pendidikan politik kepada Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Aceh Timur dan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang dihadapi oleh Bakesbangpol dalam pendidikan politik terhadap Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Aceh Timur dan juga upaya dalam mengatasi permasalahan yang terjadi. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, sesuai dengan kondisi objektif di lapangan dan adapun tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan objek pada masa sekarang secara kualitatif data yang diperoleh dari penelitian. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan jumlah informan 4 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Peneliti menemukan fakta-fakta berupa kurangnya anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi pendidikan politik bagi Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh. Selain itu juga, peneliti menemukan fakta berupa kurangnya pegawai yang dimiliki oleh Kesbangpol dalam pelaksanaan tupoksi tersebut serta kurangnya kompetensi atau kemampuan yang dimiliki pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pendidikan politik bagi Organisasi Kemasyarakatan. **Kesimpulan:** Peneliti dari penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi yang dapat dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupa memanfaatkan Organisasi Kemasyarakatan yang terdekat serta memberikan pelatihan kompetensi bagi pegawai yang ada. Dari kesimpulan tersebut, penulis menyarankan agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat memanfaatkan media-media sosial yang ada dalam pemberian pendidikan politik bagi Organisasi Kemasyarakatan serta melakukan sosialisasi agar para Organisasi Kemasyarakatan dapat segera mendaftar ke Kesbangpol Kabupaten Aceh Timur. Kemasyarakatan.

Kata Kunci : Strategi, Pendidikan Politik, Organisasi Kemasyarakatan.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era otonomi daerah yang sedang berkembang ini masyarakat di tuntut untuk lebih proaktif dan responsif dalam menanggapi berbagai gejolak dan perubahan yang sedang terjadi di masyarakat. Ruang yang luas telah diberikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bagi pemerintahan daerah untuk mampu meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik kepada masyarakat. Hal tersebut tercantum jelas dalam sila keempat Pancasila dan penjabaran dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal ke 2. Masyarakat harus mampu terlibat dalam kegiatan politik, turut ambil bagian dalam proses pembuatan kebijakan serta menjadi subjek dan objek politik yang memiliki pemahaman politik yang mapan. Dengan demikian tujuan dari otonomi daerah yakni terselenggaranya demokrasi dapat tercapai. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik menggambarkan dengan jelas bahwa pemerintah mempunyai kewajiban dan peran yang penting dalam rangka penyelenggaraan pendidikan politik. Terdapat suatu hal yang menarik perhatian penulis, salah satu sasaran fasilitas penyelenggaraan pendidikan politik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 ialah Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi ternyata belum mampu memadukan bidang pendidikan dan bidang politik dengan baik dan benar. Dalam kenyataan di lapangan bidang pendidikan berjalan sendiri, sedangkan bidang politik semakin kabur dengan berbagai polemik dan isu-isu yang ada dan semakin menggemparkan. Hal tersebut dikarenakan belum adanya sistem pendidikan politik yang baik, yang mampu mengatur serta memadukan antara pendidikan dengan politik, sehingga mampu menjadi senjata yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam memahami politik secara komprehensif, aplikatif, dan praktis. Namun pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum mengerti pentingnya partisipasi mereka dalam memilih seorang pemimpin. Hal ini dapat kita lihat dari masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti jumlah partai maupun cara menyalurkan hak suaranya seperti yang diberitakan oleh antaranews.com tanggal 30 Oktober 2022 mengenai *Menembus batas demi tingkatkan partisipasi pada Pemilu 2024*. Hal ini disebabkan masyarakat kurang merespon berita tentang perkembangan politik dan pemerintahan. Rendahnya respon tersebut dikarenakan pendidikan politik yang mereka terima masih kurang dan kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten yang melakukan sosialisasi mengenai dunia politik. Masyarakat lebih sering mendapatkan informasi dari media massa yang masih meragukan kebenarannya karena banyak media massa yang tidak independen. Hal ini dapat kita lihat dari data Kominfo yang menyatakan bahwa terdapat 5.156 temuan hoax dari periode bulan Agustus 2018 sampai 31 Maret 2021. Dimana, isu politik menjadi temuan isu hoax terbanyak sebanyak 1.025, yang kemudian disusul isu pemerintahan sebesar 922.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keselarasan bidang keilmuan yang dikaji oleh peneliti. Penelitian pertama yaitu penelitian yang berjudul *Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik Di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat*. Penelitian ini ditulis oleh Ashariadi, Ilham Agung (2021). Hasil dari penelitian ini yaitu pendidikan politik yang diselenggarakan belum maksimal dikarenakan penyusunan renstra yang membelenggu, keterbatasan anggaran, metode yang dilakukan, tidak memiliki silabus, serta kualitas dari SDM masyarakat rendah. Namun badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah memiliki upaya guna mengatasi hambatan tersebut

untuk memaksimalkan penyelenggaraan pendidikan politik tersebut. Penelitian kedua berjudul *Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Selatan*. Penelitian kedua yang menginspirasi peneliti ditulis oleh Anggraini, Siti Apridina dan Siswanto Joko dan Marpaung, Zailani Surya (2020). Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan sudah cukup baik, namun belum memenuhi kriteria kelembagaan Leo Agustino, karena masih terdapat kendala antar lembaga. konsultasi. Selanjutnya penelitian ketiga yang menginspirasi peneliti ialah *Peranan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda Di Kota Pekanbaru*. Penelitian ketiga ini ditulis oleh Ikhsan, Muhammad (2022). Peneliti yang menulis penelitian ini menemukan bahwa terdapat upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yakni pelaksanaan tugas sesuai aturan dan koridor, menerapkan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan serta melakukan pendidikan politik pada generasi muda secara masif di masyarakat. Dan penelitian terakhir yang menjadi inspirasi bagi peneliti dalam melakukan penelitian berjudul *Strategi DPW Partai Gelora Indonesia Provinsi Lampung Dalam Pendidikan Politik Pada Kaum Milenial Di Provinsi Lampung*. Penelitian ini ditulis oleh Afryan, Wahyu P. P Arzi (2022). Hasil penelitian didapatkan bahwa konsep pendidikan politik yang ditawarkan oleh DPW Partai Gelora Indonesia Provinsi Lampung adalah Arah Baru Indonesia (ABI) dan menjadikan Indonesia sebagai kekuatan 5 besar dunia. Strategi dan implementasinya yang dilakukan dalam menuangkan konsep pendidikan politiknya tersebut pada kaum milenial dimulai dengan cara open rekrutmen menggunakan aplikasi yang mudah diakses; pelatihan-pelatihan kepartaian secara online; diskusi online, dan pertemuan langsung secara terbatas; podcast dan konser musik yang memiliki studio di kantor sekretariatnya; silaturahmi ke berbagai tokoh dan instansi yang ada di provinsi Lampung; serta memberikan dukungan pada saat pilkada serentak 2020.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu, pada penelitian pertama penelitian sebelumnya membahas tentang Peran Kesbangpol dalam menyelenggarakan pendidikan politik di Kabupaten Cirebon, sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang Strategi Kesbangpol dalam Pendidikan Politik kepada Organisasi Masyarakat. Pada penelitian kedua perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang Peran Kesbangpol dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik di Kabupaten Cirebon, sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang Strategi Kesbangpol dalam Pendidikan Politik kepada Organisasi Masyarakat. Pada penelitian ketiga peneliti dalam penelitian ini membahas strategi Kesbangpol dalam memberikan pendidikan politik sedangkan peneliti sebelumnya membahas tentang Peran Kesbangpol dalam Meningkatkan Pendidikan Politik Generasi Muda. Dan pada penelitian terakhir sasaran penelitian yang dituju yaitu kaum milenial sedangkan pada penelitian ini peneliti berfokus pada organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Timur.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Strategi tantangan atau hambatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memberikan pendidikan politik bagi Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh.

II. METODE

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:9) penelitian pendekatan kualitatif adalah penelitian yang melandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian tersebut adalah instrumen atau kunci. Berkaitan dengan karakteristik penelitian kualitatif di atas, dalam kegiatan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif.

Ibrahim (2015:59) memaparkan bahwa penelitian deskriptif ialah penelitian yang bertujuan menggambarkan keadaan obyek yang sedang diteliti sesuai dengan situasi dan kondisi saat penelitian dilakukan. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara semi terstruktur dan Teknik wawancara *purposive sampling*. Serta peneliti mengumpulkan dokumentasi data Kesbangpol Kabupaten Aceh Timur, laporan tahunan Kabupaten Aceh Timur, serta berbagai jurnal maupun literatur yang terkait dengan penelitian. Peneliti melakukan wawancara terhadap 4 orang informan yang terdiri dari; Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Timur, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Timur, Kepala Bidang Politik Kemasyarakatan, Kepala Sub Bidang Fasilitas Ormas, LSM dan Organisasi Orang Asing. Adapun analisisnya menggunakan 3 tahapan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Strategi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Pendidikan Politik Bagi Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh dengan menggunakan analisis SWOT (Rangkuti,2014) untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dan efisien. Analisis SWOT adalah suatu analisis dengan mengidentifikasi faktor-faktor secara terstruktur untuk merumuskan strategi organisasi. Berdasarkan pada logika, analisis ini dapat menentukan dan memanfaatkan kekuatan serta peluang, dan secara beriringan juga meminimalkan kelemahan dan ancaman. Pembahasan lengkap analisis SWOT akan dijelaskan peneliti dalam beberapa sub bab berikut:

3.1. Kekuatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memberikan pendidikan politik kepada Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Aceh Timur

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Timur Bapak Iskandar, S.H, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Timur Bapak Syamsuar, S.Sos, M.Si, Kepala Bidang Politik Kemasyarakatan Bapak Drs. Madfudhi dan Kepala Sub Bidang Fasilitas Ormas, LSM dan Organisasi Orang Asing Bapak Zahrinur. Peneliti menemukan kekuatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Timur dalam melaksanakan pendidikan politik terhadap Organisasi Kemasyarakatan sebagai berikut :

- a) Banyaknya jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang sudah terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Timur.
- b) Organisasi Kemasyarakatan yang sudah terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Timur merupakan Organisasi Kemasyarakatan yang sudah terverifikasi dan dapat dipertanggung jawabkan.
- c) Adanya peraturan Qanun Kabupaten Aceh Timur No 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Timur No 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur yang menjadi acuan dan patokan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Timur dalam melaksanakan pendidikan politik bagi Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Aceh Timur.

3.2. Kelemahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memberikan pendidikan politik kepada Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Aceh Timur

Peneliti menemukan kelemahan Bakesbangpol Kabupaten Aceh Timur dalam melaksanakan pengawasan pemilihan umum. Kelemahan ini peneliti dapatkan setelah melihat hambatan internal Bakesbangpol dalam memberikan Pendidikan politik kepada organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Aceh Timur yang akan di sebutkan sebagai berikut :

- a) Kurangnya anggaran dari Pemerintah Daerah untuk mengcover kegiatan pendidikan pada semua ormas yang ada
- b) Wilayah Kabupaten Aceh Timur yang relatif luas
- c) Jarak antar Organisasi Kemasyarakatan yang berada di Kabupaten Aceh Timur yang relatif berjauhan.

3.3. Peluang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memberikan pendidikan politik kepada Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Aceh Timur

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Timur Bapak Iskandar, S.H, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Timur Syamsuar, S.Sos, M.Si, Kepala Bidang Politik Kemasyarakatan Bapak Drs. Madfudhi, dan Kepala Sub Bidang Fasilitas Ormas, LSM dan Organisasi Orang Asing Bapak Zahrinur. SP. Peneliti menemukan peluang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Timur dalam melakukan pendidikan politik terhadap Organisasi Kemasyarakatan sebagai berikut :

- a) Kemudahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Timur dalam melakukan pendidikan politik yang dikarenakan jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang besar dari berbagai macam bidang.
- b) Adanya Organisasi Kemasyarakatan dari kepemudaan sehingga mempermudah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Timur dalam merangkul para pemuda yang ada.

3.4 Ancaman Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memberikan pendidikan politik kepada Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Aceh Timur

Berdasarkan hambatan yang dihadapi, maka peneliti menyimpulkan beberapa tantangan yang dihadapi Bakesbangpol Kabupaten Aceh Timur dalam melaksanakan pendidikan politik terhadap Organisasi Kemasyarakatan sebagai berikut :

- a) Banyaknya Organisasi Kemasyarakatan yang hanya mendaftarkan diri di Kemenkumham dan tidak mendaftarkan diri ke Kesbangpol Kabupaten Aceh Timur
- b) Luas wilayah Kabupaten Aceh Timur yang relatif luas
- c) Jarak antar kecamatan yang relatif berjauhan.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hambatan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memberikan pendidikan politik kepada Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Aceh Timur dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yakni hambatan internal dan hambatan eksternal. Adapun hambatan internal meliputi antara lain :

- a) Kurangnya sumber daya pegawai yang ada dalam melakukan pendidikan politik terhadap Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Aceh Timur;
- b) Kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh para pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Timur dalam melakukan pendidikan politik kepada Organisasi Kemasyarakatan;
- c) Masih belum optimalnya pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Timur dalam mengoptimalkan media-media sosial yang ada dalam melakukan pendidikan politik kepada Organisasi Kemasyarakatan;
- d) Kurangnya anggaran dari pihak Pemerintah Daerah terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Timur untuk melaksanakan tugas dan fungsi melaksanakan pendidikan politik kepada Organisasi Kemasyarakatan.

Adapun hambatan eksternal yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memberikan pendidikan politik kepada Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Aceh Timur yakni :

- a) Banyaknya Organisasi Kemasyarakatan yang hanya mendaftarkan diri di Kemenkumham dan tidak mendaftarkan diri ke Kesbangpol Kabupaten Aceh Timur;
- b) Luas wilayah Kabupaten Aceh Timur yang relatif luas;

- c) Jarak antar kecamatan yang relatif berjauhan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data mengenai strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memberikan pendidikan politik kepada Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Aceh Timur maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

- a) Pemanfaatan Organisasi Kemasyarakatan yang telah terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Timur yang berasal dari beraneka ragam bidang untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat.
- b) Pemanfaatan aturan yang ada secara optimal oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Timur dalam melakukan pendidikan politik terhadap Organisasi Kemasyarakatan.
- c) Pemanfaatan aturan yang ada untuk mengakomodir para Organisasi Kemasyarakatan yang belum mendaftar sehingga mendaftarkan diri ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Timur.
- d) Pemanfaatan Organisasi Kemasyarakatan yang ada untuk melakukan sosialisasi bagi Organisasi Kemasyarakatan yang jaraknya saling berdekatan.
- e) Pemanfaatan anggaran yang ada untuk melakukan pendidikan politik bagi Organisasi Kemasyarakatan yang jaraknya cukup jauh.
- f) Pemanfaatan secara optimal media-media sosial yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Timur dalam melakukan pendidikan politik terhadap Organisasi Kemasyarakatan.
- g) Peningkatan kompetensi para pegawai dengan melakukan pelatihan teknologi informatika (IT) dalam beberapa pelatihan yang ada.
- h) Pemanfaatan para pegawai yang memiliki kompetensi dalam melakukan pendidikan politik terhadap para pegawai yang kompetensinya kurang dalam melakukan pendidikan politik terhadap Organisasi Kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan secara langsung oleh peneliti lakukan terhadap strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memberikan pendidikan politik kepada Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Aceh Timur, maka saran yang peneliti berikan adalah sebagai berikut :

- a) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diharapkan dapat melakukan rekrutmen pegawai untuk menanggulangi kekurangan pegawai dalam pemberian Pendidikan Politik bagi Organisasi Kemasyarakatan
- b) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Timur diharapkan dapat memberikan pelatihan bagi para pegawai guna meningkatkan kompetensi para pegawai yang ada dalam melaksanakan pendidikan politik terhadap Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Aceh Timur.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni terbatasnya waktu serta sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan penelitian sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).

Peneliti menyadari dan memahami bahwa hasil dari temuan penelitian yang ditulis ini masih terbatas dari segi keilmuan dan metodologi. Penulis menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan dikemudian hari untuk pengembangan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Timur beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- A, Ibrahim, M. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif. Alfabeta: Bandung.
- Rangkuti, Freddy. 2014. *Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012) 2013. *Metode Penelitian Pendidikan – Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabet.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik

C. JURNAL DAN SKRIPSI

- Afryan, W. P. (2022). *Strategi Dpw Partai Gelora Indonesia Provinsi Lampung Dalam Pendidikan Politik Pada Kaum Milenial Di Provinsi Lampung* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Anggraini, S. A., Siswanto, J., & Marpaung, Z. S. (2020). *Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Selatan* (Doctoral Dissertation, Sriwijaya University).
- Ashariadi, I. A. (2021). *Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik Di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat* (Doctoral Dissertation, Ipdn Jatinangor).
- Ikhsan, M. (2022). *Peranan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda Di Kota Pekanbaru* (Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

D. LAIN-LAIN

<http://Eppid.Kominfo.Go.Id> .Data Statistik Hoax Agustus 2018 -31 Maret 2020. Senin, 8 November 2022

<http://www.AntaraneWS.Com>. Menembus Batas Demi Tingkatkan Partisipasi Pada Pemilu 2024. Senin, 8 November 2022